

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM ADMINISTRASIPAJAK, DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAPEFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

Suhara^{*1}, Rustan DM², Sylvia Sjarlis³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}suharabapenda@gmail.com, ²rustandm66@gmail.com, ³sylvia.sjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Administrasi Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan waktu penelitian selama dua bulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 145 orang pegawai, sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dilakukan penarikan sampel berdasarkan rumus slovin dimana jumlah sampel yang telah diperoleh adalah 60 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber datanya adalah data primer. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket (kuesioner). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Kemudian, untuk uji hipotesis menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan terbukti Pengendalian Internal, Sistem Administrasi Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R² atau R Square adalah sebesar 0,646. Hasil ini berarti bahwa variabel Pengendalian Internal, Sistem Administrasi Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak memiliki hubungan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Makassar sebesar 64,6%, dan sisanya 35,4% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model

Kata kunci: Pengendalian Internal, Sistem Administrasi, Prosedur, Efektivitas Pemungutan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Internal Control, Tax Administration System and Tax Collection Procedures on the Effectiveness of Hotel Tax Collection in Makassar. The type of research used in this research is descriptive quantitative. This research was conducted at the Makassar City Regional Revenue Agency with a research time of two months.

The population in this study amounted to 145 employees, while to determine the number of samples, samples were drawn based on the slovin formula where the number of samples that had been obtained was 60 respondents. The type of data used in this research is quantitative data and the data source is primary data. In this study the data collection technique used is a questionnaire (questionnaire). The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis which is preceded by validity and reliability tests and classical assumption tests. Then, to test the hypothesis using the t test, f test and the coefficient of determination.

The results of this study prove that partially or simultaneously it is proven that Internal Control, Tax Administration Systems and Tax Collection Procedures have a positive and significant effect on the Effectiveness of Hotel Tax Collection in Makassar City. This study resulted in the value of the coefficient of determination R² or R Square was 0.646. These results mean that the variables of Internal Control, Tax Administration System and Tax Collection Procedures have a relationship with the Effectiveness of Hotel Tax Collection in Makassar by 64.6%, and the remaining 35.4% is explained by other reasons outside the model.

Keywords: Internal Control, Administration System, Procedure, Effectiveness of Tax Collection

PENDAHULUAN

Upaya pencapaian pembangunan nasional yang diarahkan pada pencapaian kehidupan yang adil dan makmur serta merata baik materil maupun spiritual maka pembangunan di segala bidang kehidupan harus digalakkan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Daerah. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tidak bisa lepas dari otonomi Daerah. Otonomi Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, faktor yang mendukung pelaksanaan dan keberhasilan otonomi Daerah yaitu memaksimalkan pendapatan asli Daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu dengan menjalankan roda pembangunan di masing-masing Daerah. Oleh karena itu perlu ada kewenangan bagi Pemerintah Daerah melalui otonomi Daerah untuk pemberdayaan potensi Daerah yang memungkinkan Pemerintah mengelola potensi Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dalam upaya memenuhi kebutuhan Daerah. Dalam mengelola tugas tersebut maka organisasi Pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan Daerah tersebut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, yaitu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Di Indonesia dilakukan pemungutan pajak. Salah satu yang berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan pembangunan dan rumah tangga pemerintah daerah Usaha Pajak hotel dan restoran adalah salah satu dan mempunyai peranan cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyaknya hotel di Kota Makassar, maka menambah PAD bagi pemerintah daerah Kota Makassar. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel, (Maulana, 2013).

Pajak hotel merupakan jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang

Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Usaha ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh), sehingga pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mempengaruhi PAD. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar tarif pajak untuk hotel sebesar 10%. Penetapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang ditindak lanjutioleh perda Nomor 15 tahun 2011 tarif pajak untuk hotel sebesar 10%.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009). Daerah Kota Makassar dalam penetapan tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 bagian keenam yaitu besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD hanya dibawah 10%. Untuk itu kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah terhadap uasaha hotel. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah kota Makassar perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak hotel dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Oleh karena itu diperlukan identifikasi mengenai variabel- variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/ usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar.

Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah

Kota Makassar, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Pengendalian Intern dalam suatu organisasi mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan, karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dan kesemuanya itu dapat terlaksana dengan baik apabila suatu organisasi memiliki suatu sistem pengendalian intern yang baik. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap SKPD diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggung jawaban Daerah.

Pengendalian intern menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) yang dikutip oleh (Boochooldt 1999) adalah suatu proses yang dipatuhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberi jaminan yang memadai dalam pencapaian salah satu atau lebih tujuan yang dimaksud, yaitu kepercayaan informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan dengan berbagai peraturan dan Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, menurut Bodnar (2002:169) terdapat beberapa elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu pengendalian intern yang mencakup: "The control environment, Risk assesment, control activities, Information and Comunication, dan Monitoring". Pada kelima komponen tersebut terdapat saling keterkaitan dan sinergi, yang berubah dinamis sesuai dengan perubahan kondisi.

Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya terutama aktifitas yang berhubungan dengan bidang di dalamnya pada Pendapatan Asli Daerah, sistem penerimaan pajak Daerah memerlukan suatu sistem penerimaan dan pengendalian intern yang memadai guna menyelesaikan masalah yang muncul. Meskipun pada kenyataannya pelaksanaan pemungutan pajak Daerah terkadang tidak berjalan lancar dan maksimal hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah seperti penyetoran besarnya pajak oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diomsetkan atau justru realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan serta kecenderungan wajib pajak untuk selalu menunda pembayarannya. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemungutan pajak daerah yaitu dengan menganalisis struktur pengendalian intern dalam pungutan pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terdiri dari praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, fasilitas kerja pegawai, menghitung penerimaan realisasi pajak Daerah dan juga beberapa persentase kontribusi pajak terhadap PAD Kota Makassar. Berikut adalah tabel laporan target dan realisasi pada Badan Pendapatan Daerah untuk Pajak Hotel yang tercatat selama lima tahun.

Tabel 1. Laporan Target Dan Realisasi Pajak Hotel Badan Pendapatan Daerah KotaMakassar

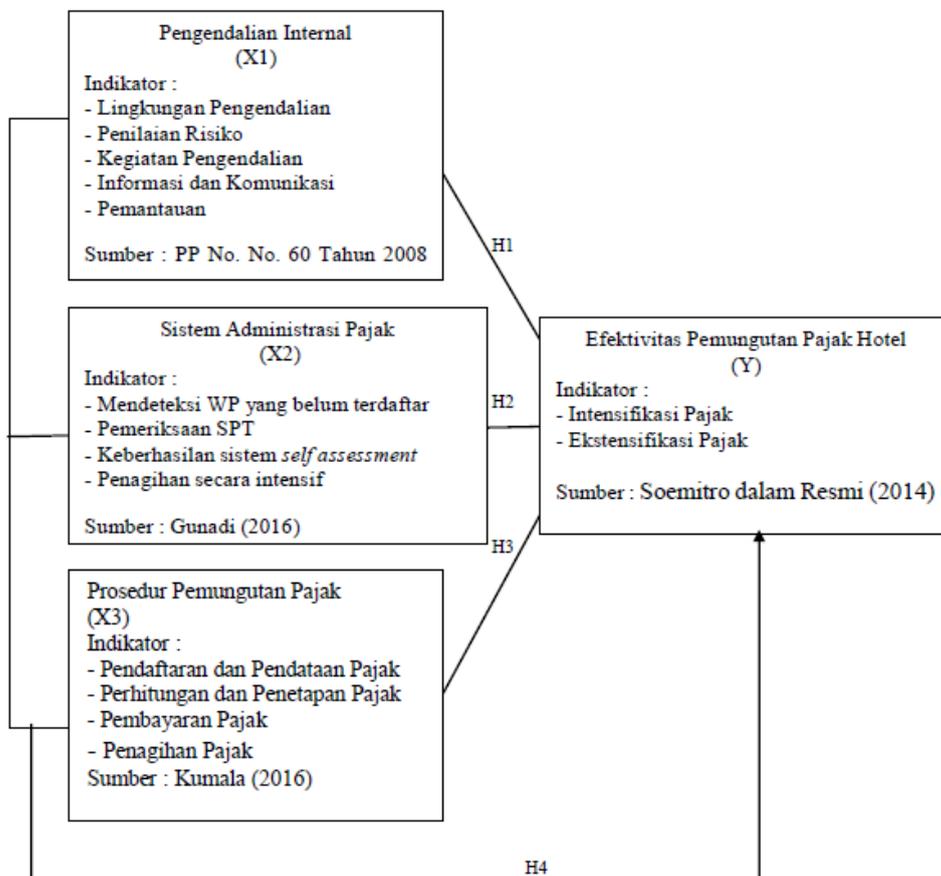
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2017	1,000,000,000	98,634,599	9.86
2018	130,000,000,000	103,142,302,558	79.34
2019	135,000,000,000	120,487,321,549	89.25
2020	72.000.000.000	55.082.353.413	76.5
2021	70.000.000.000	75.883.764.009	108,41%

Sumber: Laporan BAPENDA Kota Makassar

Berdasarkan data tabel 1. terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak Daerah selamakurung waktu 2017-2021 memiliki perbedaan fluktuatif yang cukup signifikan. Namun demikian hal ini tidak bisa dikatakan tanpa masalah sebab, bisa jadi penetapan target penerimaan yang telah dihitung berdasarkan potensi riil objek pajak ataupun karena penetapan target yang tidak didasarkan perhitungan yang cermat terhadap objek pajak yang ada di Kota Makassar. Oleh karena itu pengendalian intern seharusnya mencakup seluruh rangkaian proses yang terjadi dalam sistem pemungutan pajak Daerah.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangkapemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat tiga hipotesis yang

dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar.
2. Bahwa sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar.
3. Bahwa prosedur pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar.
4. Bahwa pengendalian internal, sistem administrasi pajak, dan prosedur pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji keberlakuan teori tersebut. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Kota Makassar, namun untuk kepentingan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Waktu penelitian rencana akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai yang berstatus PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berjumlah sebanyak 145 orang. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel dilakukan penarikan sampel berdasarkan rumus slovin. Berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5% dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 60 (dibulatkan) responden. Dengan demikian maka sampel tersebut sudah dapat dikatakan representative dapat mewakili populasi yang ada.

Jenis data yang akan digunakan untuk kepentingan pengolahan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (Field Research). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya dengan cara mengumpulkan hasil dari semua data yang di dapatkan dari kantor, kemudian data-data tersebut dijadikan sebagai input dalam penelitian. Penelitian lapangan ini meliputi angket (questionnaire). Angket (questionnaire) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Kemudian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf kepercayaan 0,05. Apabila nilai F hitung > dari nilai F tabel, maka berarti

variabel bebasnya secara serentak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikatnya, atau hipotesis diterima. Besarnya pengaruh itu dapat dilihat pada nilai R². Uji T berfungsi untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel pada taraf kepercayaan 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson correlation</i>	R Tabel	Keterangan
Pengendalian Internal (X1)	Pernyataan 1	0.547	0,254	Valid
	Pernyataan 2	0.258	0,254	Valid
	Pernyataan 3	0.415	0,254	Valid
	Pernyataan 4	0.362	0,254	Valid
	Pernyataan 5	0.303	0,254	Valid
Sistem Administrasi Pajak (X2)	Pernyataan 1	0.718	0,254	Valid
	Pernyataan 2	0.777	0,254	Valid
	Pernyataan 3	0.794	0,254	Valid
	Pernyataan 4	0.509	0,254	Valid
Prosedur Pemungutan Pajak (X3)	Pernyataan 1	0.360	0,254	Valid
	Pernyataan 2	0.361	0,254	Valid
	Pernyataan 3	0.430	0,254	Valid
	Pernyataan 4	0.569	0,254	Valid
Efektivitas Pemungutan Pajak (Y)	Pernyataan 1	0.450	0,254	Valid
	Pernyataan 2	0.734	0,254	Valid
	Pernyataan 3	0.566	0,254	Valid
	Pernyataan 4	0.267	0,254	Valid
	Pernyataan 5	0.450	0,254	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Alpha	Keterangan
Pengendalian Internal (X1)	0,618	0,60	Reliabel
Sistem Administrasi Pajak (X2)	0,852	0,60	Reliabel
Prosedur Pemungutan Pajak (X3)	0,689	0,60	Reliabel
Efektivitas Pemungutan Pajak (Y)	0,705	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.863	2.223		-1.288	.203
	X1 (Pengendalian Internal)	.242	.086	.264	2.802	.007
	X2 (Sistem Administrasi Pajak)	.418	.091	.451	4.597	.000
	X3 (Prosedur Pemungutan Pajak)	.364	.082	.373	4.459	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y)

Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,863 + 0,242 X1 + 0,418 X2 + 0,364 X3$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -2,863 (Negatif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Pengendalian Internal (X1), Sistem Administrasi Pajak (X2) dan Prosedur Pemungutan Pajak (X3) nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) akan turun sebesar 2,863 Satuan.
2. Nilai koefisien variabel Pengendalian Internal (X1) sebesar 0,242 artinya jika pengendalian internal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka efektivitas pemungutan pajak hotel akan meningkat sebesar 0,242 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pengendalian internal dengan efektivitas pemungutan pajak hotel.
3. Nilai koefisien variabel Sistem Administrasi Pajak (X2) adalah sebesar 0,418 artinya jika variabel sistem administrasi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka efektivitas pemungutan pajak hotel juga akan meningkat sebesar 0,418 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara sistem administrasi pajak dengan efektivitas pemungutan pajak hotel.
4. Nilai koefisien variabel Prosedur Pemungutan Pajak (X3) adalah sebesar 0,364 artinya jika prosedur pemungutan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka efektivitas pemungutan pajak hotel juga akan ikut meningkat sebesar 0,364 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara prosedur pemungutan pajak dengan efektivitas pemungutan pajak hotel.

Uji T (Secara Parsial)

Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t statistik pada $df = n-k$ atau $60-3 = 57$ (k adalah jumlah variabel independen). Dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 2.002. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel Pengendalian Internal (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,802.

Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,802 > 2,002$), maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pengendalian Internal (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y).

2. Pada variabel Sistem Administrasi Pajak (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,597. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($4,597 > 2,002$), maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Sistem Administrasi Pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y).
3. Pada variabel Prosedur Pemungutan Pajak (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,459. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($4,459 > 2,002$), maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Prosedur Pemungutan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y).

Uji f (Secara Simultan)

**Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.300	3	26.433	34.081	.000 ^b
	Residual	43.434	56	.776		
	Total	122.733	59			

a. Dependent Variable: Y (Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel)

b. Predictors: (Constant), X3 (Prosedur Pemungutan Pajak), X1 (Pengendalian Internal), X2 (Sistem Administrasi Pajak)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F-hitung sebesar 34,081 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($34,081 > 2,770$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pengendalian Internal (X1), Sistem Administrasi Pajak (X2) dan Prosedur Pemungutan Pajak (X3) terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804 ^a	.646	.627	.88068

a. Predictors: (Constant), X3 (Prosedur Pemungutan Pajak), X1 (Pengendalian Internal), X2 (Sistem Administrasi Pajak)

b. Dependent Variable: Y (Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel)

Sumber: Output SPSS 25

Koefisien determinasi R^2 atau R Square adalah sebesar 0,646. Hasil ini berarti bahwa variabel Pengendalian Internal (X_1), Sistem Administrasi Pajak (X_2) dan Prosedur Pemungutan Pajak (X_3) memiliki hubungan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (Y) sebesar 64,6%, dan sisanya 35,4% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil bahwa jika Pengendalian Internal mengalami peningkatan maka Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Pengendalian Internal dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Pengendalian Internal, diperoleh t -hitung lebih besar dari t -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan hal yang utama dan sangat dibutuhkan, sehingga kegiatan operasional dan kinerja dalam rangka pemungutan pajak hotel yang memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaannya, dimana kesemuanya itu dapat terlaksana dengan baik karena Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki suatu sistem pengendalian internal yang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan menurut Hery (2014) bahwa sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Pengendalian Internal yang baik pada instansi yang berwenang akan mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qoriah dan Kautsar (2017) yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemungutan pajak hotel (X) terhadap efektivitas pajak hotel (Y) adalah positif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, dimana diperoleh koefisien regresi sebesar 4,396. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Mahua (2019), dimana hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan Kota Medan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan.

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Sistem Administrasi

Pajak mengalami peningkatan maka Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Sistem Administrasi Pajak dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Sistem Administrasi Pajak, dimana diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sistem Administrasi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Administrasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Makassar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar adalah karena adanya penerapan sistem administrasi perpajakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana dalam pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam reformasi administrasi perpajakan telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga, dengan penerapan sistem ini akan menjadi lebih efisien, ekonomis dan cepat dalam proses pemungutan pajak hotel.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Pasalong (2017) bahwa administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistis dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan. Dengan terciptanya Sistem Administrasi Pajak yang baik dan ditunjang kerja sama dengan sesama pegawai, maka akan mencapai hasil yang dapat meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tologana dan Kalalo, (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewi (2018), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangli. Apabila penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh pada efektivitas pemungutan pajak.

Pengaruh Prosedur Pemungutan Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Prosedur Pemungutan Pajak mengalami peningkatan, maka Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Prosedur Pemungutan Pajak dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Prosedur Pemungutan Pajak dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Prosedur Pemungutan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Prosedur Pemungutan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak

hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak terlepas dari sistem yang sudah di susun, dimana dalam pelaksanaannya telah tersedia berbagai sarana dan prasarana yang memadai bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam menunjang pemungutan pajak hotel agar wajib pajak dapat lebih nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga, dengan penerapan prosedur tersebut pemungutan pajak hotel yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan pendapat Yakub (2012) yang memaparkan bahwa prosedur merupakan suatu kerjasama dari prosedur-prosedur yang berhubungan untuk melakukan suatu tujuan dan kegiatan tertentu. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian kualitatif sebelumnya oleh Trisnawati (2016) yang menyatakan bahwa faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik adalah pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah karena kurangnya kesadaran wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
2. Variabel Sistem Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
3. Variabel Prosedur Pemungutan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
4. Variabel Pengendalian Internal, Sistem Administrasi Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis keempat dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, Andi, Arifwangsa., Subhan., Muhammad, Nur. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*, (Online), Vol.02. No.1
- Agoes, Sukrisno., dan Estralita, Trisnawati. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Aprilia, Ayu, Annisa., Sugeng, Praptoyo. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di Dppk Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (Online), Volume 5, Nomor 3.
- Casavera. (2009). *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit : Graha Ilmu.

Yogyakarta.

- Dian, Kartikasari., Muhammad, Farid, Ma'ruf, S.Sos., M.AP. (2014). Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Di Kota Kediri.
- Erlangga, Yolina., Meilani, S. (2009). Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, cetakan pertama. Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta.
- Fauziatur, Rohma., Kusni, Hidayati., Susi, Tri, Wahyuni. (2017). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, (Online), Vol. 3. (<http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/467>).
- Firman, A., & Ilyas, G. B. (2021). The Effect of Kaizen Strategy on Customer Satisfaction: Empirical Study on Budget Hotels in Makassar City. *Point Of View Research Management*, 2(1), 01-09.
- Hanindita, Kumala, Anggarini., Dwiatmanto., Nila., Firdausi., Nuzula. (2014). Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan.
- Kamaluddin, Rustian. (2002). Pembangunan Ekonomi Daerah. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kusuma., Deddy, Supriady, Barat., dan Dadang, Solihin. (2002). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Marihot, Siahaan. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Moh. Sofyan. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal EKSEKUTIF*, (Online), Vol. 13 No.1.
- Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.
- Mursyidi. (2016). Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Rafika ditama. Bandung.
- Ni, Kadek, Ayu, Swasti, Perantini. (2013). Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi profesi*, (Online), Vol. 3 No. 1 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/2001>).
- Nurlan, Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta.

PT. Indeks.

Prakoso., Kesit, Bambang. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Penerbit UII Press. Yogyakarta.

Putu, Ary, Kumalayani., Made, Sukarsa., I. Nyoman, Mahaendra, Yasa. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, (Online), Vol. 5. No 1.

Said, M., & Firman, A. (2022). STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI SUMBER PAD DI WILAYAH KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, 3(5), 817-831.

Severiana, Ritni, Pasulu, Heince, R. N. Wokas. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA, (Online), Vol.3 No.2.

Siahaan, Marihot, P. (2003). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, Marihot. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syafrida, Hani., Hj. Maya, Sari. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan. Jurnal Pembangunan Perkotaan, (Online), Vol.2 No 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah.

Widjajanto, Nugroho. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta.